

# Dokumen Perjanjian Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)

- [Joint Study Group Report](#) for Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)
- [Fact-Sheet Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement \(IC-CEPA\)](#) (Ind)
- Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 1](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 2](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 3](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 4](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 5](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 6](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 7](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 8](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 9](#) (ENG)

[Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Chile-Indonesia CEPA Part 10](#) (ENG)



- [Komitmen Chile dalam Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement \(IC-CEPA\)](#)

## Peraturan

- **[Peraturan Presiden \(PERPRES\) Nomor 11 Tahun 2019](#)** Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)
- **[Peraturan Menteri Keuangan \(PMK\) Nomor 105/PMK.010/2019](#)** Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile

<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 1</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 2</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 3</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 4</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 5</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 6</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 7</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 8</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 9</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 10</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 11</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 12</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 13</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 14</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 15</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 16</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 17</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 18</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 19</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 20</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 21</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 22</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 23</a>

<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 24</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 25</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.010/2019 Part 26</a>

- **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 1</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 2</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 3</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 4</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 5</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 6</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 7</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 8</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 9</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2019 Part 10</a>

- **Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia

<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 1</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 2</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 3</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 4</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 5</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 6</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 7</a>
<a href="#">Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 59 Tahun 2019 Part 8</a>